

EFEKTIVITAS *TASK FORCE* DALAM PENANGANAN *STUNTING* DI KOTA SURAKARTA

Lila Nazhifah, Sudarmo

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret
email: lilanazh23@student.uns.ac.id

Abstrak

Stunting merupakan masalah kesehatan kronis yang dihadapi Indonesia dengan prevalensi yang masih tinggi, termasuk di Kota Surakarta. Dampak *Stunting* meliputi penurunan kualitas sumber daya manusia, produktivitas ekonomi, dan potensi peningkatan ketimpangan sosial. Pemerintah Kota Surakarta telah membentuk satuan tugas khusus atau *Task force* untuk menangani *Stunting* dengan pendekatan terpadu melalui berbagai program dan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas *Task force* dalam menurunkan angka *Stunting* di Kota Surakarta. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi dokumentasi terhadap instansi terkait. Teori efektivitas organisasi menurut Duncan dalam buku Richard M. Steers menjadi kerangka analisis, yang meliputi aspek pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas *Task force* di Surakarta, mengidentifikasi hambatan koordinasi dan sinergi antar lembaga, serta menyediakan rekomendasi bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas intervensi penanganan *Stunting* di masa mendatang.

Kata Kunci: *stunting*; efektivitas; *task force*; Surakarta

Abstract

Stunting is a chronic health issue in Indonesia, with a high prevalence, including in Surakarta City. The impact of *Stunting* includes a decline in human resource quality, economic productivity, and the potential for increased social inequality. The Surakarta City Government has established a special *task force* to address *Stunting* through an integrated approach involving various programs and policies. This study aims to analyze the effectiveness of the *task force* in reducing *Stunting* rates in Surakarta City. A qualitative-descriptive approach was used, employing in-depth interviews and document review of relevant institutions. The organizational effectiveness theory by Duncan, as presented in Richard M. Steers' work, serves as the analytical framework, covering aspects of goal attainment, integration, and adaptation. The findings are expected to provide a deeper understanding of the *task force*'s effectiveness, identify coordination and synergy challenges among agencies, and offer recommendations for the government to improve the quality of *Stunting* intervention programs in the future.

Keywords: *stunting*, *effectiveness*, *task force*, Surakarta

Pendahuluan

Isu *stunting* saat ini menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan pembangunan sumber daya manusia. Bukan semata sebagai persoalan gizi, *stunting* mampu mencerminkan kompleksnya persoalan struktural yang melibatkan aspek kesehatan, sosial, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan. *Stunting* menjadi salah satu masalah gizi pada balita yang menyita perhatian global. *Stunting* merupakan kondisi di mana pertumbuhan tinggi badan anak lebih lambat dibanding teman seusianya. Penyebab utamanya adalah kurangnya asupan gizi dalam jangka panjang, yang biasanya dimulai sejak masa awal kehidupannya khususnya dalam periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Menurut laporan UNICEF, WHO, dan World Bank, diperkirakan pada tahun 2020 sekitar 149,2 juta anak atau sebesar 22 persen dari populasi anak di dunia mengalami *stunting*. UNICEF melaporkan bahwa 56 persen anak *Stunting* berada di Asia, sementara sebesar 37 persen tinggal di Afrika. Berdasarkan laporan *Global Nutrition Report* pada tahun 2016, Indonesia menempati peringkat ke-108 dari 132 negara dalam hal jumlah prevalensi *Stunting*. Data World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan angka prevalensi *Stunting* tertinggi kedua di ASEAN setelah Timor Leste. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada tahun 2022 menunjukkan penurunan angka *Stunting* di Indonesia dari 24,4 persen menjadi 21,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, prevalensi *Stunting* yang ada di Indonesia jumlahnya masih lebih tinggi dibandingkan negara berpendapatan menengah lainnya.

Kota Surakarta adalah salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, atau yang lebih banyak dikenal sebagai Kota Solo merupakan kota dengan potensi dalam berbagai sektor seperti pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun, Kota Surakarta mendapat julukan Kota Layak Anak, kasus *Stunting* pada anak-anak masih kerap ditemukan. Untuk Kota Surakarta, kasus *Stunting* yang dihadapi masih tergolong tinggi yaitu sebesar 20,4%, sementara target yang ditetapkan oleh pemerintah adalah di bawah 14%. Menurut Data dari SSGI Kota Surakarta pada tahun 2022 mencatat prevalensi *Stunting* sebesar 16,2%, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar empat persen dari tahun sebelumnya, dimana pada 2021 tercatat sebanyak 20,4% prevalensi kasus *Stunting*. Walaupun angka *Stunting* mengalami penurunan, pemerintah Kota Surakarta masih berupaya menurunkan angka prevalensi *Stunting* dan mencapai *zero stunting*. Dalam rangka mendukung program *zero stunting*, Pemerintah Kota Surakarta mendorong Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kepentingan sama dan bekerja sama dalam mengentas permasalahan *stunting*. Tanggung jawab bukan hanya dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kota Surakarta, melainkan juga sektor swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Pemerintah Kota Surakarta berupaya mempercepat penurunan angka *Stunting* (anak kerdil) dan kurang berat badan (*underweight*), meskipun jumlah kasus di Surakarta relatif rendah dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan secara nasional. Untuk

mencapai percepatan ini, diperlukan sinkronisasi dan sinergi antara pemangku kepentingan, termasuk OPD, LSM, dan masyarakat. Oleh karena itu, Walikota Surakarta mengeluarkan Keputusan Nomor 441.05/28 Tahun 2022 mengenai pembentukan Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Surakarta, yang bertujuan untuk mengurangi kasus *Stunting* di kota tersebut. *Task force* dipilih oleh Kota Surakarta untuk menangani *Stunting* secara efektif. *Task force* atau satuan tugas terdiri dari berbagai pihak termasuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Swasta, LSM, organisasi, dan akademisi, yang dibagi dalam beberapa bidang.

Pemerintah Kota Surakarta melalui peran *task force* melakukan berbagai tindakan dalam upaya mewujudkan Kota Surakarta *zero Stunting* atau tidak ada tambahan kasus *Stunting* baru. Hal ini merupakan langkah yang positif bagi Kota Surakarta untuk menurunkan angka prevalensi *Stunting*. Melalui koordinasi yang baik, *task force* mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab *Stunting* secara lebih komprehensif, merancang solusi yang efektif, serta memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik di semua tingkatan. *Task force* dianggap sebagai salah satu penggerak yang memastikan bahwa upaya yang dilakukan dalam penanganan *Stunting* dilakukan secara terstruktur dan terkoordinasi yang dapat meningkatkan efektivitas program dan menurunkan angka *Stunting*. Namun, dalam pelaksanaannya hubungan kerja sama dalam tim ini bukanlah hal yang mudah karena dibutuhkan komitmen dan dari masing-masing anggota tim untuk melakukan kinerjanya. Efektivitas *Task force* dalam menangani *Stunting* di Kota Surakarta sangat bergantung pada koordinasi yang efisien, sumber daya yang memadai, serta keterlibatan aktif semua pihak. Meskipun struktur kelembagaan telah dibentuk dan program-program sudah dijalankan, kondisi di lapangan menunjukkan angka prevalensi *stunting* masih belum mencapai target yang ditentukan serta masih ditemukannya kasus baru, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai sejauhmana peran *task force* telah berjalan secara efektif dalam mendorong percepatan penurunan angka *stunting*. Meskipun telah terjadi penurunan prevalensi *Stunting*, jarak antara capaian saat ini dengan target nasional sebesar 14% mendorong perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai proses pelaksanaan program dan koordinasi yang dijalankan oleh *task force*.

Berdasarkan teori efektivitas organisasi menurut Duncan dalam buku Richard M. Steers, salah satu aspek penting dalam efektivitas organisasi adalah integrasi, kemampuan setiap aktor untuk bekerja sama dengan bersinergi. Dalam banyaknya kasus, program yang baik tidak selalu berhasil karena ada masalah dalam koordinasi antar instansi. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi kendala-kendala dalam koordinasi dan pelaksanaan program di lapangan. Melalui analisis efektivitas *task force*, penelitian ini akan membahas mengenai sejauh mana kolaborasi antar lembaga berjalan.

Metode

Penelitian ini dilakukan di Kota Surakarta sebagai lokasi penelitian karena Kota Surakarta masih masuk kategori persentase prevalensi *stunting* medium (20-29,9%) di tahun 2022. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif.

Ada dua sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumentasi. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Lokasi Penelitian

Kota Surakarta merupakan salah satu wilayah administratif yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kota Surakarta terletak di bagian Tenggara Provinsi Jawa Tengah. Kepadatan penduduk kota Surakarta pada tahun 2022 mencapai 12.381,05 jiwa/km². Berdasarkan data program gizi yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan Kota Surakarta pada tahun 2022 terdapat balita dengan kurang gizi sebesar 803 (3,23 persen) dari 24.917 balita yang ditimbang. Selain itu terdapat data balita pendek pada tahun 2022 sebesar 788 (3.17 persen). Pada tahun 2024 Kota Surakarta masih terus menghadapi permasalahan *stunting*, tercatat bahwa pada tahun 2024 terdapat 900 kasus balita *stunting*.

2. Upaya Penanganan *Stunting* oleh Pemerintah Kota Surakarta

Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan berbagai upaya dalam menurunkan angka *stunting* di Kota Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta melalui Keputusan Walikota Surakarta Nomor 441.05/28 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Surakarta, melakukan kerja sama dengan berbagai instansi untuk menurunkan angka *stunting* dan mewujudkan Kota Surakarta menjadi *zero stunting*. Keputusan Walikota tersebut juga mencantumkan tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing bidang yang termasuk dalam *task force*. Pembagian peran tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa intervensi penurunan *stunting* dapat dilakukan secara terpadu melalui kolaborasi lintas sektor. Masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki kontribusi spesifik yang saling melengkapi, mulai dari koordinasi perencanaan, pemberdayaan keluarga, hingga pelayanan kesehatan. Melalui sinergi inilah yang memiliki kontribusi pada penurunan prevalensi *stunting* di Kota Surakarta

B. Pembahasan

Penilaian efektivitas merupakan suatu hal penting dalam suatu organisasi karena umunya akan digunakan sebagai suatu ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Efektivitas *task force* merupakan salah satu cara untuk mengukur sejauhmana *task force* mampu menganani *stunting* dalam mencapai tujuannya. Analisis efektivitas *task force* penanganan *stunting* di Kota Surakarta menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan dalam Richard M Steers (1985). Menurut Duncan, efektivitas organisasi dapat dilihat melalui tiga dimensi utama dengan beberapa indikator terkait, diantaranya ada:

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan pada penelitian ini dapat dilihat melalui beberapa hal seperti komitmen dalam capaian target menangani *stunting*. Dalam wawancara dengan setiap OPD yang tergabung dalam *task force* dapat dilihat bahwa setiap OPD telah memiliki komitmennya dalam mencapai target penurunan *stunting* di Kota Surakarta.

a. Pencapaian target dalam penanganan *stunting*

Pencapaian target merupakan indikator utama dalam menilai efektivitas *task force*. Berdasarkan hasil penelitian, prevalensi *stunting* di Kota Surakarta menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Meskipun target penurunan *stunting* yang ditetapkan pemerintah belum sepenuhnya tercapai, berbagai upaya yang dilakukan menunjukkan adanya kemajuan dalam penanganan *stunting*.

b. Relevansi program terhadap tujuan

Program yang dilaksanakan oleh *task force* telah disesuaikan dengan tujuan percepatan penurunan *stunting*. Berbagai intervensi seperti pendampingan keluarga berisiko *stunting*, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak menunjukkan adanya keterkaitan langsung dengan upaya pencegahan dan penanganan *stunting*.

c. Efektivitas implementasi program

Efektivitas implementasi program penanganan *stunting* di Kota Surakarta masuk pada kategori belum efektif. Pelaksanaan program yang tepat sasaran, tepat waktu, dukungan data akurat, serta dilaksanakan sesuai pedoman teknis telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan.

d. Komitmen organisasi

Komitmen merupakan salah satu bentuk keterikatan dari setiap orang yang melakukan sesuatu secara bersama. Adanya komitmen dalam organisasi ditujukan untuk pencapaian tujuan organisasi dapat tercapai. Untuk mengetahui komitmen *task force* dalam melaksanakan tugasnya, sudah berkomitmen dengan ditunjukkan melalui berbagai program yang dilakukan untuk menangani *stunting*.

2. Integrasi

Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan OPD dalam *task force* untuk mengadakan koordinasi, sosialisasi, dan komunikasi lainnya. Dalam integrasi diharapkan organisasi dapat saling mengisi kebutuhan satu dengan yang lainnya.

a. Koordinasi lintas Sektor

Koordinasi lintas sektor dilakukan melalui rapat koordinasi, monitoring, evaluasi, dan forum komunikasi yang melibatkan berbagai perangkat daerah. Koordinasi ini bertujuan menyelaraskan program dan memastikan

setiap instansi menjalankan perannya secara optimal. Melalui koordinasi tersebut, pelaksanaan program penanganan stunting dapat berjalan lebih terarah dan terpadu.

b. Komunikasi internal dan eksternal

Komunikasi dilakukan untuk menyampaikan informasi terkait pelaksanaan program, capainnya, dan kendala yang dihadapi. Komunikasi dilakukan antar individu dalam instansi tersebut dan dilakukan juga dengan instansi satu dengan lainnya.

c. Reliabilitas kelembagaan

Reliabilitas kelembagaan ditunjukkan melalui kejelasan struktur organisasi, pembagian tugas, dan dasar hukum yang mendukung pelaksanaan task force. Keberadaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) memberikan landasan bagi setiap perangkat daerah untuk menjalankan tugasnya secara terkoordinasi sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif.

d. Dalam penanganan *stunting* di Kota Surakarta yang dilakukan oleh *task force*, reliabilitas terlihat melalui struktur organisasi yang jelas melalui Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS), pembagian peran lintas sektor, mekanisme rapat rutin, dan prosedur pelaporan. Struktur organisasi memastikan setiap OPD memahami fungsi dan kewajibannya, sehingga mengurangi potensi tumpang tindih dan konflik peran

e. Kerjasama Tim

Kerja sama tim terlihat dari keterlibatan berbagai perangkat daerah dalam melaksanakan program secara bersama-sama. Setiap instansi saling mendukung sesuai kewenangannya, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Misalnya DP3AP2KB bekerjasama dengan Dinas PUPR dalam penanganan stunting warga yang memiliki masalah sanitasi.

3. Adaptasi

Adaptasi menggambarkan sejauh mana organisasi mampu mengidentifikasi masalah baru, merespons tantangan yang muncul, serta penyesuaian kebijakan dan strategi.

a. Fleksibilitas

Fleksibilitas dalam menjalankan kegiatan diperlukan karena untuk menyesuaikan kondisi di masyarakat. Penyesuaian ini merupakan bentuk adaptasi yang memungkinkan intervensi penanganan stunting dapat diterima oleh sasarannya. Fleksibilitas ini bentuknya berbagai macam, misalnya menggunakan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar untuk memperbaiki atau mengubah pendekatan program yang dianggap kurang efektif sehingga pelaksanaan program dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Inovasi program

Inovasi program dalam penanganan stunting di Kota Surakarta terlihat melalui penerapan Sigrak Cetingan sebagai sistem yang mendukung identifikasi dan pemantauan keluarga berisiko stunting. Pemanfaatan sistem ini membantu pemerintah daerah dalam memperoleh data yang lebih cepat sehingga intervensi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

c. Responsivitas terhadap perubahan

Responsivitas ini terlihat dari kemampuan organisasi dalam menyesuaikan tindakan ketika ditemukan peningkatan keluarga berisiko stunting, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu, keterbatasan pemahaman keluarga mengenai pemenuhan gizi anak, maupun adanya perubahan data sasaran stunting. Contohnya, ketika ditemukan balita dengan kondisi gizi yang menurun atau keluarga yang tidak rutin mengikuti posyandu, *task force* melakukan tindak lanjut melalui pendampingan keluarga secara langsung, pemberian edukasi tambahan mengenai pola asuh dan pemenuhan gizi, serta peningkatan monitoring oleh kader dan tenaga kesehatan.

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian menyeluruh, *task force* penanganan stunting di Kota Surakarta telah menjalankan perannya, melalui berbagai program dan kerjasama lintas sektor antar instansi perangkat daerah dalam upaya menurunkan angka stunting. Pelaksanaan program menunjukkan adanya pencapaian tujuan, koordinasi antar instansi, serta kemampuan beradaptasi melalui berbagai inovasi dan intervensi yang dilakukan kepada masyarakat. Namun, efektivitas pelaksanaan *task force* masih belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat beberapa kendala, seperti belum sinkronnya data antar instansi, koordinasi yang belum sepenuhnya optimal, serta masih adanya kasus stunting baru yang ditemukan di lapangan. Secara keseluruhan, *task force* penanganan stunting di Kota Surakarta menunjukkan pelaksanaan yang cukup baik, tetapi efektivitasnya masih belum sepenuhnya tercapai sesuai target yang diharapkan.

B. Saran

Penulis memberikan saran yang diharapkan mampu mendukung *task force* yang bertanggung jawab untuk memperbaiki pelayanan dan diharapkan mampu mewujudkan target yang sudah ditetapkan. Saran tersebut antara lain:

1. Bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) diharapkan mampu memperkuat perencanaan berbasis data yang akurat serta memastikan sinkronisasi program lintas sektor dan penganggaran menjadi tepat sasaran.

2. Bagi Dinas Kesehatan perlu meningkatkan kualitas dan jangkauan dalam intervensi, termasuk dalam pemantauan kesehatan ibu dan anak, deteksi dini risiko *stunting*, dan perlunya penguatan layanan posyandu.
3. Bagi DP3AP2KB diharapkan dapat mengoptimalkan peran pendampingan keluarga, meningkatkan edukasi dan perubahan perilaku masyarakat terkait pola asuh dan gizi. DP3AP2KB juga bisa berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat untuk menjangkau edukasi masyarakat.

Referensi

- Ansell, C. & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*. J-PART, Vol 18. No. 4, PP 544-571
- Asriadi. (2025). *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Tangerang: UNPAM PRESS
- Camussi, E., Rella, R., Grigis, P.C., Sassi, C., & Annovazzi, C. (2021). Women and Covid19: How the Italian Government *Taskforce* Fostered Gender Equity. *Frontiers in Human Dynamics*.
- Fajrinah, N. (2016). *Hubungan Faktor Ibu dengan Kejadian Stunting Pada Balita di Puskesmas Piyungan Kabupaten Bantul*. Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta.
- Firdaus, A.L., Putri, D.A.P., Suroso, .F. (2021). Peranan Satgas Dalam Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Penanganan Covid-19 di Kecamatan Selawi Kabupaten Garut. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)*, 3(1), 50-59.
- Georgopolous dan Tannebaum. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga
- Kusnandar, V. B. (2022). Prevalensi Balita *Stunting* di 6 Provinsi Ini Masih Tinggi. Diakses pada 12 September 2024 melalui <http://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/01/prevalensi-balita-stunting-di-6-provinsi-ini-masih-tinggi>
- Miles B, M., Hubberman, M. A, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*
- Oktaviani, I., & Keintjem., M. (2022). Pengaruh Kerjasama Tim dan Komunikasi Organisasi Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT. PELNI CABANG BITUNG. *Jurnal Manajemen dan Bisnis UNIMA*. Vol 7, No 9(2022)
- Steers, M. Richard. (1985). *Efektivitas Organisasi Kaidah Perilaku*. Jakarta: Erlangga
- Keputusan Walikota Surakarta Nomor 441.05/28 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kota Surakarta